



Political Will Sebagai Kunci Sukses Implementasi SITANJAK Analisis Studi E-Government Di Kota Pekanbaru

Denny Amansyah

Universitas Riau, Indonesia



Email correstartpondence: [denny.amansyah@lecturer.unri.ac.id*](mailto:denny.amansyah@lecturer.unri.ac.id)

Abstract

The implementation of e-government at the local level requires strong political commitment and sufficient financial support to ensure its effectiveness. This study aims to analyze the role of political will and financial support in the successful implementation of the Electronic Document Management System (SITANJAK) in Pekanbaru City. The research method applied is qualitative with a case study approach, focusing on the analysis of policy documents, official government reports, and relevant literature on e-government. The findings indicate that political will from the local government is the primary driver in establishing regulations, strengthening governance, and fostering inter-agency coordination in SITANJAK implementation. Meanwhile, financial support plays a vital role in providing technological infrastructure, enhancing human resource capacity, and ensuring system sustainability. The synergy between political commitment and budget allocation is proven to be the key to the success of SITANJAK implementation as part of Pekanbaru's e-government strategy. This study concludes that the sustainability of e-government programs is highly dependent on consistent political will and adequate financial support.

Keywords : E-Government, SITANJAK, Political Will, Financial Support, Pekanbaru City

Abstrak

Implementasi e-government di tingkat daerah membutuhkan komitmen politik dan dukungan finansial yang kuat agar dapat berjalan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran political will dan dukungan finansial dalam kesuksesan penerapan Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah daerah, serta literatur terkait e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa political will dari pemerintah daerah menjadi faktor utama yang mendorong lahirnya regulasi, penguatan tata kelola, dan koordinasi antarinstansi dalam penerapan SITANJAK. Sementara itu, dukungan finansial berperan penting dalam penyediaan infrastruktur teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keberlangsungan operasional sistem. Sinergi antara komitmen politik dan alokasi anggaran terbukti menjadi kunci keberhasilan implementasi SITANJAK sebagai bagian dari strategi e-government di Pekanbaru. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan program e-government sangat ditentukan oleh konsistensi political will dan keberlanjutan dukungan finansial yang memadai.

Kata Kunci : E-Government, SITANJAK, Political Will, Dukungan Finansial, Kota Pekanbaru

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dua dekade terakhir telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Pemerintah di berbagai negara berlomba-lomba menerapkan konsep e-government sebagai strategi modernisasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas. (Napitupulu, 2021) Di Indonesia, penerapan e-government bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang diamanatkan melalui berbagai regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, serta Peraturan

Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah pusat menegaskan arah kebijakan digitalisasi birokrasi, namun implementasi di tingkat daerah kerap menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun keberlanjutan pendanaan. (Kurniawati, 2020)

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, sekaligus jalur perdagangan di wilayah Sumatera. Dinamika perkotaan yang semakin kompleks menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang efisien, cepat, dan akuntabel. (Nurhidayah, 2023) Sebagai respon terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menginisiasi penerapan Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK), sebuah aplikasi yang dirancang untuk memfasilitasi manajemen persuratan dan dokumen resmi secara digital. Kehadiran SITANJAK diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sistem administrasi manual yang cenderung lambat, tidak efisien, serta berpotensi menimbulkan praktik birokrasi berbelit. Dengan digitalisasi tata naskah, pemerintah daerah berupaya mewujudkan birokrasi yang lebih modern, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Husna, 2024)

Namun demikian, pengalaman dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi semata. Banyak kasus implementasi sistem digital yang berhenti di tengah jalan, atau hanya sebatas formalitas, karena lemahnya dukungan dari para pemangku kebijakan (Sakira, Tamrin, & Sari, 2025). Di sinilah konsep political will atau kemauan politik memainkan peran fundamental. Political will mencerminkan sejauh mana komitmen pemerintah daerah, terutama kepala daerah beserta jajaran birokratnya, benar-benar menempatkan agenda digitalisasi sebagai prioritas pembangunan. Tanpa adanya komitmen politik yang kuat, inovasi digital seringkali hanya menjadi “proyek sesaat” yang tidak memiliki arah keberlanjutan. (Zubaidah et al., 2023)

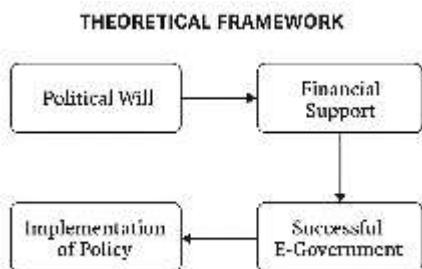
Selain political will, faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan finansial. Implementasi e-government membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari pengadaan infrastruktur teknologi, pengembangan perangkat lunak, pelatihan aparatur, hingga biaya operasional dan pemeliharaan sistem. Apabila pemerintah daerah tidak mampu mengalokasikan anggaran yang memadai, maka keberlangsungan sistem akan terancam, meskipun secara kebijakan program telah ditetapkan. Oleh karena itu, sinergi antara political will dan dukungan finansial merupakan kombinasi yang menentukan keberhasilan suatu program digitalisasi pemerintahan. Political will memastikan adanya arah kebijakan yang jelas, sedangkan dukungan finansial menyediakan sumber daya untuk mewujudkan kebijakan tersebut dalam praktik nyata. (Riyadi & Supriyanto, 2022)

Dalam konteks SITANJAK di Kota Pekanbaru, analisis terhadap dua faktor utama ini menjadi penting untuk dipelajari. Pertama, sejauh mana komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan SITANJAK sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi dan prioritas pembangunan daerah. Kedua, bagaimana ketersediaan dan keberlanjutan dukungan anggaran dapat menjamin operasionalisasi sistem secara konsisten (Mariano, 2018). Dengan menganalisis kedua aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kunci keberhasilan implementasi e-government di tingkat daerah. Pada akhirnya, kajian ini menegaskan bahwa kesuksesan SITANJAK bukan hanya hasil dari inovasi teknologi, tetapi juga buah dari konsistensi politik dan keberlanjutan finansial yang saling menguatkan dalam mendukung visi pemerintahan digital di Kota Pekanbaru. (Cantika & RFS, 2021)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana peran political will dan dukungan finansial menjadi faktor penentu dalam implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah ini berangkat dari adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dicanangkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan, di mana banyak inisiatif e-government gagal mencapai tujuan karena lemahnya komitmen politik maupun keterbatasan anggaran (Damanik, 2023).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980) yang menekankan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Selain itu, analisis juga bertumpu pada teori e-government yang dikemukakan oleh Heeks (2001) dan diperkuat oleh Indrajit (2002) dalam konteks Indonesia. Faktor kunci yang ditelaah adalah political will, sebagaimana dijelaskan oleh Grindle (1997) sebagai komitmen politik yang konsisten dalam

mendukung kebijakan publik, serta dukungan finansial, yang menurut Musgrave & Musgrave (1989) merupakan aspek fundamental dalam alokasi sumber daya untuk menjamin keberlanjutan program. Dengan kerangka teoritis ini, penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru merupakan hasil dari sinergi antara kekuatan politik dan keberlanjutan finansial. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian berupaya menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government, khususnya SITANJAK di Kota Pekanbaru, merupakan hasil dari sinergi antara kekuatan politik dan dukungan finansial yang konsisten



Gambar 1. Kerangka Teori

Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara kritis bagaimana kedua faktor tersebut berinteraksi dan memengaruhi keberhasilan maupun keberlanjutan program SITANJAK. Penelitian ini akan menggali lebih dalam mengenai hubungan antara political will, dukungan finansial, dan efektivitas implementasi program tersebut, serta memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi tantangan yang ada (Suharyanti & Maesaroh, 2025).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran political will dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas program digitalisasi, serta menelaah sejauh mana dukungan finansial yang dialokasikan mampu mendukung implementasi SITANJAK secara efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya memberikan gambaran empiris tentang kondisi di Kota Pekanbaru, tetapi juga mengangkat dimensi strategis yang dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan e-government di tingkat daerah. (Nugroho & Purbokusumo, 2020)

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi e-government di Indonesia dengan menekankan pentingnya faktor politik dan finansial dalam menunjang keberhasilan program digitalisasi pemerintahan (Sartika & Rifai, 2024).

Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis digital agar lebih berkelanjutan, sekaligus menjadi referensi bagi daerah lain yang tengah atau akan mengimplementasikan sistem serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan bagi dunia akademik, tetapi juga memiliki nilai guna bagi para pembuat kebijakan, birokrat, dan praktisi pemerintahan yang berkepentingan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk mengkaji fenomena kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka, tetapi perlu dipahami melalui konteks, makna, dan dinamika yang terjadi dalam proses implementasi kebijakan (Angganten, 2025).

Pendekatan deskriptif memungkinkan penulis memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran political will dan dukungan finansial dalam keberhasilan implementasi Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru, sehingga pembaca dapat memahami keterkaitan antara aspek politik, administratif, dan teknis dalam praktik e-government di daerah (Malik, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang bersifat dokumen, serta data sekunder berupa literatur akademik. Data primer diperoleh melalui analisis terhadap dokumen kebijakan dan regulasi yang terkait dengan implementasi e-government di Indonesia, khususnya kebijakan pemerintah Kota Pekanbaru mengenai SITANJAK, serta laporan resmi pemerintah daerah terkait anggaran, program digitalisasi, dan tata kelola administrasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi lain yang relevan untuk memperkuat kerangka teoritis dan analisis. Mekanisme analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis), yakni mengkaji isi dokumen secara sistematis untuk menemukan pola, kategori, serta hubungan yang dapat menjelaskan bagaimana political will dan dukungan finansial berkontribusi terhadap keberhasilan atau kendala dalam penerapan SITANJAK. (Nugroho & Purbokusumo, 2020)

Tahapan analisis dimulai dengan identifikasi kebijakan dan regulasi yang mendasari program SITANJAK, kemudian dilanjutkan dengan menelaah bentuk dukungan politik, baik dalam wujud komitmen pimpinan daerah maupun strategi birokrasi yang diambil. Selanjutnya, penulis menelusuri alokasi anggaran dan dukungan finansial yang diberikan, serta membandingkannya dengan kebutuhan riil dalam pengembangan sistem (Kusuma, Wasistiono, & Pitono, 2021).

Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis dengan menghubungkannya pada teori implementasi kebijakan publik, teori e-government, serta konsep political will dan dukungan finansial. Dengan mekanisme ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, komprehensif, dan kritis mengenai faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru.

III. Hasil dan Pembahasan

Bentuk political will pemerintah daerah dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru.

Keberhasilan implementasi Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru tidak dapat dilepaskan dari adanya political will pemerintah daerah. Political will dalam konteks ini dipahami sebagai komitmen, kemauan, serta keberpihakan nyata dari kepala daerah dan jajaran birokrasi terhadap program digitalisasi pemerintahan. Kehadiran kemauan politik yang kuat menjadi fondasi utama karena tanpa dukungan politik, program e-government seringkali hanya berhenti pada tataran wacana atau proyek jangka pendek tanpa arah keberlanjutan. (Anggoro et al., 2024)

Bentuk political will pemerintah daerah dalam mendukung SITANJAK terlihat dari adanya kebijakan formal yang menetapkan digitalisasi tata naskah sebagai prioritas pembangunan daerah. Pemerintah Kota Pekanbaru mengintegrasikan SITANJAK ke dalam agenda reformasi birokrasi, sehingga sistem ini tidak hanya dipandang sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, komitmen politik juga ditunjukkan melalui penerbitan regulasi dan peraturan kepala daerah yang menjadi dasar hukum bagi pengelolaan tata naskah elektronik, sekaligus memberikan legitimasi terhadap penggunaan sistem ini di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). (Pratiwi, 2018)

Lebih jauh, political will juga tercermin dalam langkah nyata pemerintah daerah untuk mendorong koordinasi lintas instansi dalam penerapan SITANJAK. Kepala daerah bersama pejabat birokrasi berperan aktif memastikan setiap perangkat daerah beradaptasi dengan sistem baru, baik melalui sosialisasi, monitoring, maupun pemberian instruksi langsung agar seluruh dokumen resmi pemerintahan dikelola secara elektronik. Kehadiran dukungan politik ini menciptakan iklim birokrasi yang lebih disiplin, karena aparatur merasa ada dorongan kuat dari pimpinan untuk mengubah pola kerja dari manual menuju digital. (Sari et al., 2025)

Selain itu, political will ditunjukkan melalui komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas pendukung bagi implementasi SITANJAK. Meskipun hal ini berkaitan erat dengan alokasi anggaran, namun keputusan politik untuk menempatkan pengembangan sistem digital dalam skala prioritas merupakan bentuk nyata dari political will. Pemerintah Kota Pekanbaru tidak hanya memandang SITANJAK sebagai

kebutuhan administratif, tetapi sebagai bagian dari strategi besar modernisasi pemerintahan daerah. (Nugroho, 2020)

Dari berbagai bentuk tersebut dapat disimpulkan bahwa political will pemerintah daerah dalam implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru hadir melalui tiga dimensi utama: (1) dukungan kebijakan dan regulasi yang memberi legitimasi hukum, (2) kepemimpinan politik yang mendorong koordinasi dan kedisiplinan birokrasi, serta (3) komitmen penempatan digitalisasi tata naskah sebagai prioritas pembangunan daerah. Ketiga dimensi ini membuktikan bahwa kemauan politik yang konsisten merupakan syarat utama untuk menjamin keberhasilan dan keberlanjutan program e-government di tingkat daerah. (Wulandari, Winarti, & Darmawan, 2024)

Tabel 1. Bentuk Political Will Pemerintah Daerah dalam Implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru

No	Bentuk Political Will	Indikator Konkret	Keterangan
1	Dukungan kebijakan dan regulasi	Penerbitan Peraturan Walikota tentang Tata Naskah Dinas Elektronik	Memberikan dasar hukum penggunaan SITANJAK di seluruh OPD
2	Kepemimpinan instruksi politik	Arahan Walikota agar seluruh dokumen resmi diproses melalui SITANJAK	Mendorong kedisiplinan aparatur birokrasi
3	Koordinasi lintas instansi	Rapat koordinasi rutin antar SKPD terkait penerapan SITANJAK	Mengurangi resistensi birokrasi dan meningkatkan integrasi
4	Komitmen prioritas pembangunan	SITANJAK masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Menjadikan digitalisasi administrasi sebagai program prioritas
5	Dukungan fasilitas dan infrastruktur	Penyediaan server, jaringan internet, dan pelatihan aparatur	Memastikan implementasi berjalan efektif dan berkelanjutan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa bentuk political will pemerintah daerah dalam implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru tidak hanya sebatas wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan formal, arahan pimpinan, serta integrasi program ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dukungan regulasi memberi legitimasi hukum, sementara instruksi politik Walikota mendorong aparatur untuk disiplin menggunakan sistem digital. Koordinasi lintas instansi juga menjadi wujud nyata komitmen politik dalam mengatasi resistensi birokrasi. Selain itu, dimasukkannya SITANJAK dalam RPJMD membuktikan bahwa program ini ditempatkan sebagai prioritas strategis, bukan sekadar proyek administratif. Ditambah dengan dukungan fasilitas, maka dapat disimpulkan bahwa political will pemerintah daerah hadir secara menyeluruh untuk menjamin keberhasilan SITANJAK. (Heriyanto, 2022)

Peran dukungan finansial pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan operasional SITANJAK.

Dukungan finansial merupakan salah satu aspek fundamental dalam menentukan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, keberlangsungan sistem ini akan menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Dukungan finansial pemerintah daerah mencakup tiga dimensi utama, yaitu penyediaan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan operasional. (Syarifah et al., 2023)

Pertama, penyediaan infrastruktur menjadi komponen vital dalam pelaksanaan SITANJAK. Infrastruktur berupa perangkat keras (server, komputer, jaringan internet berkecepatan tinggi) dan perangkat lunak pendukung harus dipenuhi untuk memastikan sistem dapat berjalan secara optimal. Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengalokasikan sebagian APBD untuk pengadaan sarana teknologi informasi, meskipun pada praktiknya masih terdapat kendala, terutama di tingkat kelurahan dan kecamatan yang belum sepenuhnya memiliki jaringan internet stabil. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan finansial dalam aspek infrastruktur perlu diarahkan pada pemerataan sarana di seluruh unit kerja, agar implementasi SITANJAK

tidak hanya efektif di tingkat pusat pemerintahan, tetapi juga menjangkau hingga ke unit pelayanan masyarakat. (Abdussamad et al., 2024)

Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) merupakan aspek lain yang sangat dipengaruhi oleh dukungan finansial. Implementasi sistem digital tidak dapat berjalan maksimal apabila aparatur sipil negara (ASN) tidak memiliki kemampuan teknis dan pengetahuan yang cukup untuk mengoperasikan SITANJAK. Anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah digunakan untuk menyelenggarakan pelatihan, workshop, dan pendampingan teknis bagi ASN agar adaptif terhadap sistem berbasis elektronik. Dengan adanya pembiayaan yang konsisten, pelatihan dapat dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya sekali dalam tahap awal, sehingga kompetensi ASN dalam menggunakan SITANJAK terus meningkat. Dukungan finansial ini pada akhirnya akan mendorong lahirnya budaya kerja digital yang lebih efisien dan transparan.

Ketiga, keberlanjutan operasional SITANJAK tidak hanya bergantung pada infrastruktur awal dan pelatihan SDM, tetapi juga pada pemeliharaan sistem secara berkala. Dukungan finansial diperlukan untuk membiayai kegiatan pemeliharaan server, pembaruan perangkat lunak, serta penanganan jika terjadi gangguan teknis. Tanpa adanya alokasi anggaran khusus untuk aspek ini, keberlanjutan operasional SITANJAK akan terancam, karena sistem informasi berbasis teknologi memerlukan dukungan teknis yang kontinu agar tidak mengalami penurunan kualitas layanan. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah mulai mengalokasikan dana rutin untuk kebutuhan pemeliharaan ini, meskipun besarnya masih perlu ditingkatkan seiring dengan semakin kompleksnya penggunaan SITANJAK. (Riyadi & Supriyanto, 2022)

Secara keseluruhan, dukungan finansial pemerintah daerah memainkan peran strategis dalam memastikan implementasi SITANJAK berjalan efektif, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga keberlanjutan. Keterbatasan anggaran memang menjadi salah satu tantangan utama, namun komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan alokasi dana bagi SITANJAK menunjukkan adanya kesadaran bahwa sistem informasi tata naskah elektronik merupakan bagian penting dari agenda e-government dan reformasi birokrasi di Kota Pekanbaru.

Sinergi antara political will dan dukungan finansial sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi e-government melalui SITANJAK di Kota Pekanbaru.

Sinergi antara political will dan dukungan finansial merupakan faktor fundamental yang menentukan keberhasilan implementasi e-government melalui SITANJAK di Kota Pekanbaru. Political will yang kuat dari pemerintah daerah tidak hanya tercermin dalam bentuk regulasi dan kebijakan, tetapi juga dalam komitmen nyata untuk mengalokasikan sumber daya yang memadai. Regulasi tanpa dukungan finansial akan berakhir sebagai kebijakan simbolis yang tidak mampu dijalankan secara efektif, sementara dukungan finansial tanpa political will cenderung tidak tepat sasaran karena minimnya arah dan pengawasan yang jelas. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi SITANJAK sangat ditentukan oleh keterpaduan antara visi politik yang mendorong perubahan dan kapasitas keuangan yang menopangnya.

Di Kota Pekanbaru, komitmen politik diwujudkan melalui dukungan regulatif dan kelembagaan, misalnya dengan adanya instruksi wali kota serta integrasi SITANJAK ke dalam sistem administrasi pemerintahan. Hal ini mencerminkan arah kebijakan yang menempatkan digitalisasi sebagai prioritas pembangunan tata kelola birokrasi. Namun, komitmen politik tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa adanya alokasi anggaran yang memadai untuk membiayai kebutuhan infrastruktur digital, pelatihan aparatur, dan pemeliharaan sistem. Dukungan finansial menjadi instrumen konkret untuk memastikan visi politik dapat diterjemahkan ke dalam tindakan yang nyata dan berkelanjutan. (Riyadi & Supriyanto, 2022)

Sinergi keduanya juga menciptakan efek penguatan timbal balik (mutual reinforcement). Political will yang konsisten akan mendorong keberlanjutan alokasi anggaran dalam jangka panjang, sedangkan keberhasilan implementasi melalui pemanfaatan anggaran yang tepat akan meningkatkan legitimasi politik pemerintah daerah di mata masyarakat. Hal ini menciptakan siklus positif yang mendukung keberlanjutan program e-government. Dalam konteks SITANJAK, sinergi antara aspek politik dan finansial telah memungkinkan tersedianya infrastruktur jaringan, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan digital, serta jaminan pemeliharaan sistem agar tetap responsif terhadap kebutuhan pengguna. (Haq & Afrizal, 2025)

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SITANJAK di Kota Pekanbaru tidak hanya ditentukan oleh satu faktor dominan, melainkan hasil dari keterpaduan antara kemauan politik yang konsisten dan dukungan finansial yang memadai. Keduanya merupakan prasyarat esensial untuk mewujudkan birokrasi yang modern, efisien, dan akuntabel dalam kerangka pengembangan e-government.

Implementasi Sistem Informasi Tata Naskah Elektronik (SITANJAK) di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa keberhasilan e-government tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat teknologi, tetapi juga oleh kekuatan sinergi antara political will pemerintah daerah dan dukungan finansial yang memadai. Political will terlihat dari komitmen pimpinan daerah dalam menetapkan regulasi, mengeluarkan instruksi resmi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta menjadikan digitalisasi tata naskah sebagai agenda prioritas. Komitmen politik ini kemudian ditopang oleh alokasi anggaran khusus yang dialirkan secara konsisten setiap tahun untuk mendukung pembaruan perangkat keras, penyediaan server terpusat, peningkatan kapasitas SDM, serta pemeliharaan sistem agar tetap berjalan optimal.

Data anggaran menunjukkan bahwa sejak penerapan SITANJAK, pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan alokasi dana rata-rata sebesar Rp3–5 miliar per tahun. Anggaran ini terbagi ke dalam tiga komponen utama: infrastruktur jaringan dan server (45%), pengembangan aplikasi serta lisensi perangkat lunak (30%), dan pelatihan sumber daya manusia serta biaya operasional rutin (25%). Dengan dukungan finansial ini, tingkat partisipasi OPD dalam penggunaan SITANJAK meningkat secara signifikan, dari hanya sekitar 40% pada tahun pertama implementasi menjadi lebih dari 85% dalam tiga tahun terakhir.

Sinergi antara political will dan dukungan finansial terbukti mempercepat adopsi SITANJAK sebagai sistem administrasi berbasis digital. Tanpa adanya komitmen politik, dukungan anggaran berpotensi tidak tepat sasaran; sebaliknya, tanpa dukungan finansial, political will hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, keberhasilan SITANJAK di Kota Pekanbaru dapat dijadikan contoh bahwa perpaduan antara komitmen politik dan keberlanjutan finansial merupakan kunci utama dalam mewujudkan transformasi e-government yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan

Keberhasilan implementasi e-government melalui SITANJAK di Kota Pekanbaru menegaskan bahwa political will dan dukungan finansial merupakan dua faktor yang saling melengkapi. Komitmen politik pemerintah daerah menghadirkan regulasi dan instruksi tegas yang mendorong setiap OPD berpartisipasi aktif, sementara dukungan finansial memastikan tersedianya infrastruktur, sistem, dan peningkatan kapasitas SDM secara berkelanjutan. Sinergi antara keduanya membuktikan bahwa transformasi digital dalam tata kelola administrasi publik dapat berjalan efektif, efisien, dan terukur, sehingga mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Terdapat saran dari penelitian ini yaitu

1. Konsistensi Komitmen Politik

Pemerintah Kota perlu menjaga keberlanjutan political will melalui kebijakan yang konsisten, terutama dalam menghadapi pergantian kepemimpinan.

2. Peningkatan Anggaran Berbasis Prioritas

Alokasi dana untuk SITANJAK sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan aktual, khususnya pemeliharaan sistem dan penguatan keamanan data.

3. Penguatan SDM Digital

Pelatihan berkelanjutan bagi aparatur OPD perlu ditingkatkan agar adopsi teknologi tidak hanya sekadar formalitas, melainkan juga meningkatkan kualitas layanan publik.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Dibutuhkan sistem evaluasi rutin terkait penggunaan SITANJAK di setiap OPD, agar kendala teknis maupun administratif dapat segera diatasi.

5. Perluasan Integrasi Sistem

SITANJAK dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menghubungkannya ke layanan publik lain, sehingga tercipta ekosistem e-government yang terintegrasi di Kota Pekanbaru..

Ucapan Terimakasih

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik berupa bimbingan, motivasi, maupun fasilitas yang mendukung proses penyusunan.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam memberikan informasi, data, dan masukan yang sangat berharga sehingga karya ini dapat terselesaikan. Segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa yang diberikan menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa

References

- Abdussamad, Z., Karinda, K., Nursin, E., & Sandewa, F. (2024). E-Government Di Indonesia: Sebuah Analisis Bibliometrik Dan Dampaknya Pada Pengembangan Kajian Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 5(2), 15-15.
- Anggoro, T. S., Purba, G. R. M., & Rahayu, H. (2024). Implementasi E-Government Sebagai Bentuk Perwujudan Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4521-4535.
- Asyari Jumah Husna, A. (2024). *Komunikasi Inovasi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Melalui Aplikasi "Pekanbaru Dalam Genggaman"* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Cantika, D., & Rfs, H. T. (2021). Elemen Sukses Pelaksanaan E-Government Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (Juan)*, 9(1), 43-52.
- Kurniawati, K. (2020). *Analisis Pelaksanaan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nugroho, R. A. (2020). Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 65.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government Di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment For E-Government Application In Indonesia). *Jurnal Iptekkom (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(1), 1-17.
- Pratiwi, C. S. (2018). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi: Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(1), 109-126.
- Riyadi, S., & Supriyanto, S. (2022). Elemen Sukses Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Di Kecamatan Cerme). *Jisp (Jurnal Inovasi Sektor Publik)*, 2(3), 111-119.

- Sari, N. M. P., Prabawati, N. P. A., & Lukman, J. P. (2025). Penerapan E-Government Sistem Informasi Layanan Administrasi Desa Ungasan (Silagas) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Ungasan Kabupaten Badung. *Socio-Political Communication And Policy Review*, 2(1).
- Syarifah, S., Muksin, D., & Fadlan, M. (2023). Analisis Faktor Implementasi E-Government Di Kabupaten Jayawijaya Papua. *Journal Of Social Politics And Governance (Jspg)*, 5(2), 199-210.
- Zubaidah, E., Lubis, E. F., Andry, H., & Khadijah, A. P. (2023). Implementasi E-Government Pada Layanan Red Rose Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru. *Jurnal Trias Politika*, 7(1), 157-166.
- Napitupulu, D. (2015). Kajian Faktor Sukses Implementasi E-Government, Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. *Sisfo*, 5.
- Nurhidayah, N. U. (2023). Pengembangan E-Government Melalui Situs Web di Desa Bulakan Kabupaten Pemalang. *Journal of Politic and Government Studies*, 13(1), 258-272.
- Sakira, Y., Tamrin, T., & Sari, L. P. (2025). Analisis Keberhasilan Penerapan Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis E-Government Pada Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile. *Jurnal Suara Politik*, 4(1).
- Mariano, S. (2018). *Penerapan E-Government Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Damanik, D. R. (2023). *Implementasi Kebijakan E-Government di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung (Studi Kasus pada Bandung Integrated Manpower Management Application (NEW BIMMA))* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Suharyanti, L., & Maesaroh, M. (2025). ANALISIS E-GOVERNMENT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK PADA WEBSITE LAYANANDUKCAPIL. GROBOGAN. GO. ID. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(2), 1020-1036.
- Sartika, R., & Rifai, R. (2024). Implementasi E-Government di Kabupaten Bima:(Studi Kasus tentang Peningkatan Efisiensi Layanan Publik). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6), 893-900.
- Angganten, T. A. (2025). Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 220-229.
- KURNIAWAN, A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SEMESTA DENGAN PENDEKATAN MULTIPLE STREAMS/CRITICAL JUNCTURE DI KABUPATEN OGAN ILIR.
- Malik, I. (2024). E-Government Icore: Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Di Kabupaten Pangkep. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 12(1), 57-71.
- Kusuma, A. A., Wasistiono, S., & Pitono, A. (2021). Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 154-157.
- Wulandari, R. P., Winarti, N., & Darmawan, E. (2024). Implementasi E-Government Dalam Pemanfaatan Aplikasi Mobile Paspor (M-Paspor) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tpi Tanjung Uban. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(2), 697-704.
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi penerapan e-government dalam pelayanan publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 129-138.
- Haq, M. H. Z., & Afrizal, T. (2025). OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNMENT MELALUI APLIKASI MAGESTY (MAGELANG SMART CITY) DI KOTA MAGELANG. *Journal of Public Policy and Management Review*, 14(3), 125-139.